

Lampiran : Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
 Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
 Kabupaten Banyumas.
 : Nomor : 042/ 02.1 /TAHUN 2022
 : Tanggal : 3 Januari 2022

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
 KABUPATEN BANYUMAS
 TAHUN 2022**

I. INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DI UMUMKAN							
A. INFORMASI YANG DIUMUMKAN SECARA BERKALA							
NO	JUDUL INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT /UNIT KERJA YANG Menguasai Informasi	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN INFORMASI	WAKTU PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1. INFORMASI TENTANG BADAN PUBLIK							
1.1	Visi dan Misi	Visi Dan Misi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas.	Kasubbag Perencanaan	Kasubbag Perencanaan	2018	Hard dan Soft File	Selama Berlaku
1.2	Rencana Strategis	Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023	Kasubbag Perencanaan	Kasubbag Perencanaan	2018	Hard dan Soft File	5 Tahun
1.3	Informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap	Sejarah singkat terbentuknya SKPD dan alamat lengkap - Jl. Dr. Soeparno No. 24 Purwokerto - Telp. (0281) 625893 Fax. (0281) 635327	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Update Data Tahun 2016	Hard dan Soft File	Selama Berlaku
1.4.	Tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas.	Tugas: membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan daerah. Fungsi: 1. merumuskan kebijakan umum kesekretariatan, bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi, Komunikasi, Informasi	Kasubbag Perencanaan	Kasubbag Perencanaan	2019	Hard dan Soft File	Selama Berlaku

		<p>dan Edukasi, bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, bidang Pemberdayaan Perempuan dan bidang Perlindungan Anak;</p> <p>2. melaksanakan koordinasi kebijakan umum kesekretariatan, bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi, bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, bidang Pemberdayaan Perempuan dan bidang Perlindungan Anak;</p> <p>3. melaksanakan kebijakan umum kesekretariatan, bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi, bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, bidang Pemberdayaan Perempuan dan bidang Perlindungan Anak;</p> <p>4. membina dan memfasilitasi kebijakan kesekretariatan, bidang Pengendalian Penduduk, bidang Advokasi dan KIE, bidang Keluarga Berencana, bidang Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga, bidang Pemberdayaan Perempuan dan Bidang Perlindungan Anak;</p> <p>5. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kesekretariatan, bidang Pengendalian Penduduk, bidang Advokasi dan KIE, bidang Keluarga Berencana, bidang Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga, bidang Pemberdayaan Perempuan dan Bidang Perlindungan Anak;</p> <p>6. melaksanakan administrasi kesekretariatan, bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi, bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, bidang Pemberdayaan Perempuan dan bidang Perlindungan Anak; dan</p> <p>7. melaksanakan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

		Tugas dan fungsi tercantum pada Peraturan Bupati Nomor Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas.					
1.5	Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas. Terdiri atas Kepala Dinas, Sekretaris, 4 (empat) Bidang, 3 (tiga) Kasubbag, 9(sembilan) Kasi, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Struktur organisasi, Tugas dan Fungsi tercantum pada Peraturan Bupati Nomor Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas.	Kasubbag Perencanaan	Kasubbag Perencanaan	2021	Hard dan Soft File	Selama Berlaku
1.6	Profil Pejabat Struktural Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas.	Profil singkat pejabat struktural	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	2016	Hard dan Soft File	Selama berlaku
1.7	Sumber Daya Manusia (SDM)	Jumlah PNS sebanyak 36 orang Termuat dalam Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Keadaan 31 Desember 2019	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	2021	Hard dan Soft File	Selama berlaku
1.8	LHKPN	LHKPN Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	2021	Hard dan Soft File	Selama berlaku
2	RINGKASAN PROGRAM DAN KEGIATAN						
2.1	Nama Program dan Kegiatan	Daftar Nama Program dan Kegiatan yang tertuang dalam DPA TA 2021 Dinas Pengendalian	Kasubbag program	Kasubbag program	2021	Hard dan Soft File	5 Tahun

		Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas.					
2.2	Penanggung jawab dan Pelaksana Program	Penanggung jawab dan Pelaksana Program dan Kegiatan sebagaimana termuat dalam SK Penunjukan PPK dan PPTK Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	2021	Hard dan Soft File	5 Tahun
2.3	Target dan Capaian / Penyerapan Program dan Kegiatan	Target dan Capaian / Penyerapan Program dan Kegiatan setiap bulan yang tertuang dalam Laporan Pelaksanaan APBD TA 2021 Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas.	Kasubbag Perencanaan	Kasubbag Perencanaan	2021	Hard dan Soft File	5 Tahun
2.4	Agenda / Jadwal Pelaksanaan Program dan kegiatan	Agenda / Jadwal Pelaksanaan Program dan Kegiatan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Operasional TA 2021 Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas.	Kasubbag Perencanaan	Kasubbag Perencanaan	2021	Hard dan Soft File	5 Tahun
2.5	Perjanjian Kinerja	Perjanjian kinerja pejabat struktural Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas Tahun 2021.	Kasubbag Perencanaan	Kasubbag Perencanaan	2021	Hard dan Soft File	5 Tahun
2.6	Nilai Anggaran	Nilai Anggaran Program dan Kegiatan yang tertuang dalam DPA TA 2021 Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas	Kasubbag Perencanaan	Kasubbag Perencanaan	2021	Hard dan Soft File	5 Tahun
2.7	Kerangka Acuan Kegiatan	Dokumen tentang KAK kegiatan-kegiatan Tahun 2021.	Kasubbag Perencanaan	Kasubbag Perencanaan	2021	Hard dan Soft File	5 Tahun
3	RINGKASAN KINERJA						
3.1	Penilaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan	Penilaian Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2019 yang meliputi kinerja, akuntabilitas, efisiensi, kegiatan yang telah dilaksanakan dan penggunaan anggaran.	Kasubbag Perencanaan	Kasubbag Perencanaan	2021	Hard dan Soft File	5 tahun

	Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas sebelumnya.						
3.2	Target dan Penyerapan Kegiatan	Realisasi program dan kegiatan Tahun 2021 yang meliputi jumlah kegiatan, jumlah anggaran dan prosentase penyerapan	Kasubbag Perencanaan	Kasubbag Perencanaan	2021	Hard dan Soft File	5 tahun
3.3	Laporan Pelayanan Informasi Publik	Ringkasan Laporan Permohonan Informasi Publik setiap bulan	Sekretaris	Sekretaris	Semester	Hard dan Soft File	1 tahun
4	RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN						
4.1	Laporan Keuangan Tahun 2021	Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas Tahun 2021. Laporan Neraca Keuangan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas Tahun 2021. Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2021 yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	Kasubbag Keuangan	Kasubbag Keuangan	2021	Hard dan Soft File	5 Tahun
4.2	Daftar Aset dan Inventarisasi	Rekap aset dan inventarisasi tahun 2021	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	2021	Hard dan Soft File	5 Tahun
5	PENGUMUMAN PENGADAAN BARANG DAN JASA						
5.1	Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa	Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas Tahun 2021	Pengguna Anggaran	Pengguna Anggaran	2021	Hard dan Soft File	1 Tahun
5.2	Pengumuman Proses Pengadaan	Pengumuman Proses Pengadaan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas Tahun 2021	Pengguna Anggaran	Pengguna Anggaran	2021	Hard dan Soft File	1 Tahun
B.	INFORMASI YANG TERSEDIA SETIAP SAAT						
NO	JUDUL INFPRMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT KERJA YANG Menguasai Informasi	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN Informasi	WAKTU PEMBUATAN Informasi	BENTUK Informasi YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

1	Daftar Informasi Publik (DIP)	Berisi informasi yang diumumkan secara berkala dan informasi yang tersedia setiap saat	Sekretaris	Sekretaris	2021	Hard dan Soft File	Selama Berlaku
2	Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh informasi publik	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tata cara permohonan informasi publik ▪ Formulir Permohonan Informasi Publik ▪ Tata cara pengajuan keberatan atas informasi ▪ Formulir pernyataan keberatan atas informasi 	Sekretaris	Sekretaris	2021	Hard dan Soft File	Selama Berlaku
3	Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang pejabat badan publik	Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang pejabat badan publik	Sekretaris	Sekretaris	2021	Hard dan Soft File	Selama Berlaku
4	Maklumat Pelayanan	Maklumat Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas	Sekretaris	Sekretaris	2021	Hard dan Soft File	Selama Berlaku
5	Hasil penanganan pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Laporan akses informasi publik melalui website dinas tiap semester tahun 2021 ➢ Rekap pengaduan melalui media sosial twitter setiap bulan tahun 2021 	Sekretaris	Sekretaris	2021	Hard dan Soft File	Selama Berlaku
6	SOP Pelayanan Informasi Publik	Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas	Sekretaris	Sekretaris	2021	Hard dan Soft File	Selama Berlaku
7	Peraturan perundang-undangan, keputusan/kebijakan	Peraturan perundang-undangan, keputusan/kebijakan Dinas Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kasubag Umum dan Kepegawaian	2017	Hard dan Soft File	Selama Berlaku
8	Informasi tentang kegiatan SKPD	Informasi tentang Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kasubag Umum dan Kepegawaian	2021	Hard dan Soft File	Selama Berlaku
9	Rencana Kerja Tahunan	Rencana Kerja Tahunan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas Tahun 2021	Kasubag Program	Kasubag Program	2021	Hard dan Soft File	Selama Berlaku

II. DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN

A. INFORMASI YANG DIKECUALIKAN KATEGORI UMUM

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT JIKA INFORMASI DI BUKA	MANFAAT JIKA INFORMASI DI TUTUP
1	Identitas PNS yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak Terbatas	Mengungkap rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia

2	Identitas PNS yang mengajukan izin perceraian/perkawinan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak Terbatas	Mengungkap rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
3	Dokumen/Berkas/Arsip PNS	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak Terbatas	Mengungkap rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
4	Data usulan pengangkatan PNS dalam jabatan struktural	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Sampai dengan pelantikan	Merugikan proses penyusunan kebijakan atau menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Menjaga iklim kondusif di lingkungan kerja
5	Arsip dinamis yang menurut sifatnya rahasia	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i	Tidak Terbatas	Merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Melindungi kerahasiaan dokumen
6	Dokumen Penawaran Kontrak	✓ UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i dan huruf j ✓ Keppres No. 80 tahun 2003 beserta perubahannya	Selama Proses pengadaan Barang/Jasa	Muncul Persaingan usaha yang tidak sehat	Dapat menjaga objektivitas penilaian
7	Lokasi Server	UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Tansaksi Elektronik / ITE (Pasal 30-37)	Tak Terbatas	Tindakan kriminal pengrusakan, pencurian data	Melindungi/ mengamankan perangkat serta data
8	Internet Protocol / IP Address Private	UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik / ITE (Pasal 30)	Tak Terbatas	Penerobosan/ penyalahgunaan hak akses	Menjaga/melindungi hak akses
9	Bandwith Management	UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik / ITE (Pasal 30)	Tak Terbatas	Penyalahgunaan kapasitas bandwith diluar ketentuan	Mengatur kestabilan penggunaan bandwith
10	Kode Akses Elektronik	UU no. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik / ITE (Pasal 1 angka 16)	Tak Terbatas	Penyalahgunaan Oleh Pihak Lain	Menjaga Keamanan jaringan Komputer
11	Sistem Keamanan Elektronik	✓ UU 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf j ✓ UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Tak Terbatas	Penyalahgunaan Oleh Pihak Lain	Menjaga keamanan Database
12	Sistem Managemen Database	✓ UU 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf j ✓ UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Tak Terbatas	Penyalahgunaan Oleh Pihak Lain	Menjaga Keamanan Database

B. INFORMASI YANG DIKECUALIKAN KATEGORI KHUSUS					
NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT JIKA INFORMASI DI BUKA	MANFAAT JIKA INFORMASI DI TUTUP
1	Identitas korban yang dirujuk Pusat Pelayanan Terpadu Kabupaten Banyumas (DPPKBP3A Kab. Banyumas)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak Terbatas	Mengungkap rahasia pribadi (menggangu kondisi psikologis dan traumatis)	Melindungi hak pribadi
2	Identitas pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak pada Pusat Pelayanan Terpadu Kab. Banyumas. (DPPKBP3A Kab. Banyumas.)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak Terbatas	Mengungkap rahasia pribadi (menggangu kondisi psikologis)	Melindungi hak pribadi
3	Identitas anak yang konsultasi telepon melalui program TESA 129	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak Terbatas	Mengungkap rahasia pribadi (menggangu kondisi psikologis)	Melindungi hak pribadi
4	Alamat shelter penampungan korban yang sedang ditangani/ diberikan pendampingan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak Terbatas	Kelangsungan hidup korban kekerasan menjadi terancam	Keamanan dan hak pribadi korban kekerasan dapat terlindungi

KEPALA DPPKBP3A
KABUPATEN BANYUMAS,



SUYANTO